



MENERKA ARAH ALIRAN DANA 'PANAS' HIBAH

KPK PERIKSA 17 ORANG, TERMASUK KETUA DAN WAKIL KETUA DPRD JATIM

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) makin rajin datang ke Jawa Timur (Jatim), tampaknya komisi anti-rasuah menargetkan kasus dugaan suap dana hibah segera tuntas. Terbaru, sedikitnya sekitar 17 orang dengan status saksi diperiksa Rabu (25/1/2023) di Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur (Jatim). Diantara para terduga ada Ketua DPRD Jatim, Kusnadi. Tak sendiri, 3 pimpinan lain juga ikut dipanggil yaitu Anik Maslachah, Anwar Sadad dan Achmad Iskandar. Kusnadi saat ditanya terkait materi pemeriksaan memilih menjawab 'aman' dengan meminta konfirmasi ke KPK. Berbeda dengan Anwar Sadad yang mengaku menjelaskan alur dana hibah mulai dari bagaimana anggota dewan menerima aspirasi masyarakat, hingga memperjuangkan aspirasi itu melalui peraturan perundangan yang berlaku. Sampai mana dana 'panas hibah' Jatim mengalir?

(Baca Hal 11)

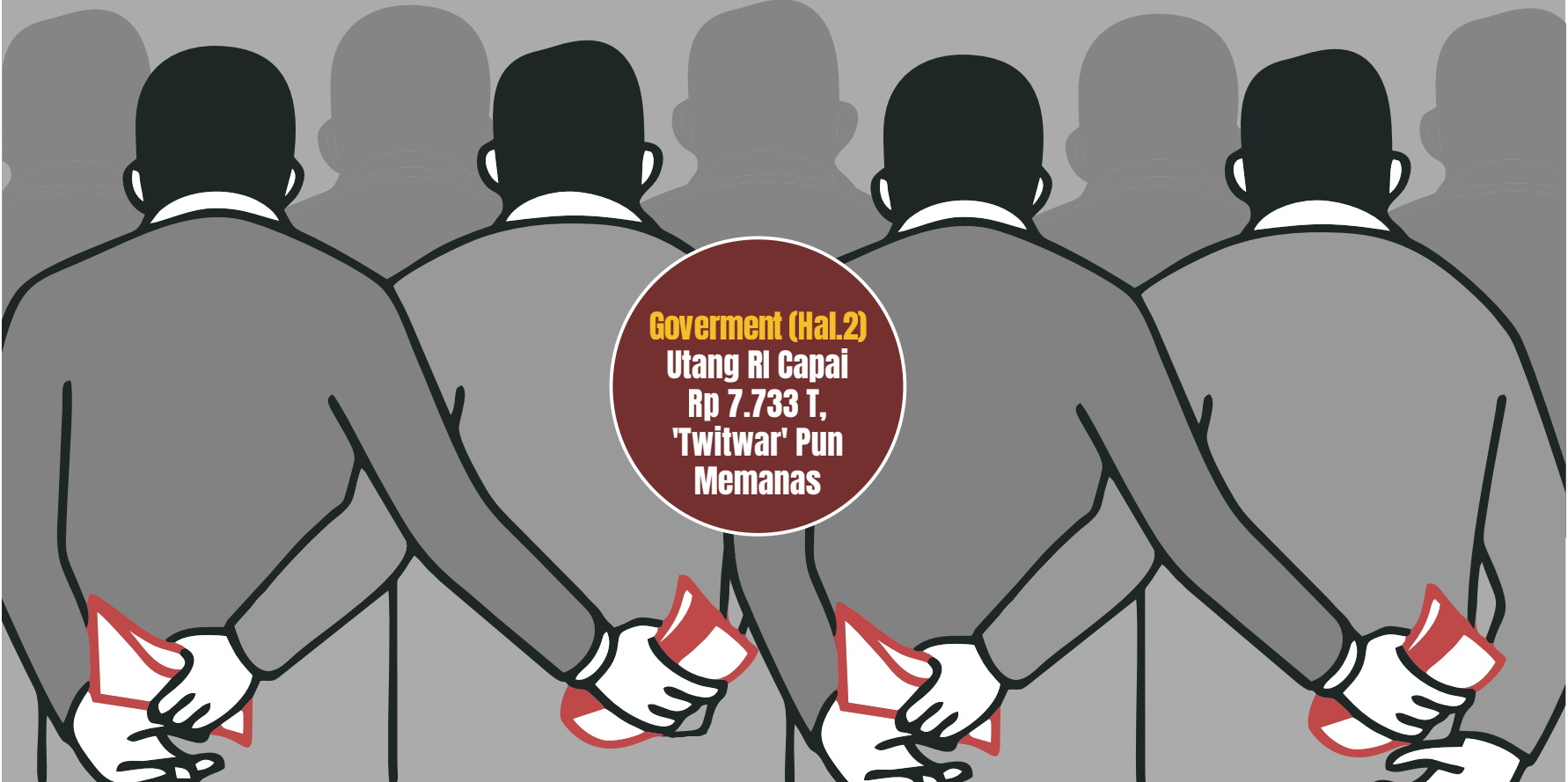
1. Rudi, PNS pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang
2. Hodari, Kepala Desa Robatal
3. Ahmad Firdausi, Camat Robatal
4. Edy Tambeng Widjaja, Kadis PU dan Bina Marga Jatim
5. Baju Trihaksoro, Kadis Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jatim
6. Muhammad Isa Anshori, Kadis PU Sumber Daya Air Provinsi Jatim

7. Andik Fadjar Tjahjono, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (2022-sekarang)
8. Moh. Holil Affandi, Swasta
9. Kusnadi, Ketua DPRD Prov Jatim
10. Anik Maslachah, Wakil Ketua DPRD Prov Jatim
11. Anwar Sadad, Wakil Ketua DPRD Prov Jatim
12. Achmad Iskandar, Wakil Ketua DPRD Prov Jatim

13. Anggar Ariqint, Staf Bidang Rendalev BAPPEDA Prov. Jatim
14. Arief Rachman Hakim, Staf Bidang Rendalev BAPPEDA Prov. Jatim
15. Moh. Huda Prabawa, Staf Bidang Rendalev BAPPEDA Prov. Jatim
16. Nininng Lustari Staf Bidang Rendalev BAPPEDA Prov. Jatim
17. Ikmal Putra, Kabid Rendalev BAPPEDA Prov. Jatim

**PIHAK YANG
DIPERIKSA KPK
SOAL DUGAAN
SUAP DPRD JATIM**

**Government (Hal.2)
Utang RI Capai
Rp 7.733 T,
'Twitwar' Pun
Memanas**



Utang RI Capai Rp 7.733 T, 'Twitwar' Pun Memanas

JAKARTA - Bak sudah menjadi tradisi, saat nilai utang negara dipublikasikan, 'perang' pun dimulai. Tak hanya perdebatan secara langsung, tapi Twitwar--diskusi di media sosial khususnya Twitter--memanas. Terbaru, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengaku siap untuk meladeni Sekretaris Departemen IV DPP Partai Demokrat Hasbil Mustaqim Lubis untuk debat secara langsung membahas utang.

Pernyataan Yustinus ini sebagai respons atas kicauan Hasbil yang menyebut utang rezim saat ini sangat tinggi. Awalnya, Hasbil lewat akun Twitternya @Hasbil_Lbs mengatakan, utang rezim ini sangat tinggi yang mencapai Rp 7.733 triliun.

"Kalau om @prastow senang menampilkan data, kami juga punya om. Silahkan ditanggapi, dengan senang hati saya menunggu. Sekali lagi, rezim ini akan meninggalkan utang yg sangat tinggi (Rp.7.733, 99 Triliun). Berani mengakuinya om?" cuit Hasbil seperti dilihat Rabu (25/1/2023).

Dalam cuitannya, Hasbil juga melampirkan foto atau gambar yang memberikan penjelasan soal utang. Dijelaskannya, rasio utang saat ini sudah di sekitar level 40%. Diakuinya, memang masih jauh dari pagu APBN yakni di level 60%.

"Akan tetapi berbicara tentang utang kita sebaiknya merujuk kepada acuan GUID 5250 Guidance on the Audit of Public Debt sebagaimana tercantum pada Laporan Review atas Kesenambungan Fiskal BPK 2020 yang pada tahun 2021 tidak diterbitkan," terangnya.

Kemudian dijelaskan, kerentanan utang terhadap kondisi perekonomian ditunjukkan dengan kondisi penerimaan negara yang berdampak pada kesinambungan utang. Penerimaan negara diperlukan untuk membayar utang. Berdasarkan perhitungan, beberapa indikator telah melampaui batasan/threshold pada GUID 5250 Guidance on the Audit of Public Debt," ujarnya.

Adapun rinciannya untuk debt service to revenue nilainya 46,77% pada tahun 2020, melampaui batas IMF 25-35%. Sementara, interest to revenue nilainya 19,06%, di atas batas IMF 7-10% dan IDR 4,6-6,8%. Berikutnya, debt to revenue nilainya 368,99% atau di atas batas IMF 90-150% dan IDR 92-167%.

Merespons hal itu, Yustinus mengatakan, pihaknya membaca dan mempelajari Laporan Hasil Reviu Atas Kesenambungan Fiskal Tahun 2020. Namun, kata dia, kondisi tersebut sudah terpaut 2 tahun anggaran dari sekarang dan 2020 merupakan tahun puncak himpitan pandemi COVID-19 terjadi.

Yustinus pun kemudian memberikan penjelasan panjang lebar. Dia menerangkan, di tahun 2020 ekonomi melambat, penerimaan tertekan. Tapi di sisi lain belanja harus ditingkatkan untuk menanggulangi COVID dan pemulihan ekonomi. Konsekuensinya, defisit APBN melebar. Menurutnya, Perppu 1 Tahun 2020 merupakan terobosan penting.

Tahun 2023, pandemi beralih ke fase endemi. Aktivitas pun mulai menggeliat. Berbagai indikator makroekonomi dan keuangan negara mengalami perbaikan, seperti pertumbuhan ekonomi. Karenanya, tahun 2020 tidak relevan jika dijadikan bahan diskusi pengelolaan utang saat ini.

"Bahkan jika kita perhatikan pada dokumen yang sama, perbandingan rasio utang atas PDB Indonesia termasuk yang paling rendah di antara negara-negara ASEAN lainnya yakni 39,4%, lebih rendah dari Malaysia, Singapura, Thailand. Pentingnya membaca komprehensif ya," cuit Yustinus. Yustinus Prastowo mengizinkan media mengutip cuitannya.

Lanjutnya, salah satu rekomendasi BPK adalah pemerintah perlu



menetapkan strategi yang tepat untuk mencapai target fiskal yaitu defisit kembali pada batas tidak melampaui 3% dari PDB. Realisasi APBN 2022 defisit mencapai 2,38% atau setahun lebih cepat dari mandat Perppu 1/2020.

Reformasi Perpajakan

Melanjutkan amanat UU, pemerintah melakukan konsolidasi fiskal menuju tingkat rasio defisit kembali di bawah 3% PDB di tahun 2023, termasuk melanjutkan upaya reformasi perpajakan dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, antara lain melalui penerbitan UU HPP.

"Pinjem Farel dan Abah Lala: kita harus adil dalam membandingkan. Setiap rezim pasti meninggalkan utang, pun juga kenaikan nilai aset, PDB, dan belanja negara. Nah, sesekali liriklah data ini. Biar nggak mikir utang melulu. Belanja, aset, PDB kita meningkat signifikan," kata Yustinus.

Analisis IMF terbaru, kata Yustinus menyebutkan bahwa utang pemerintah masih moderat dan tetap sustain, kepercayaan para investor

tetap besar, peringkat kredit juga masih di investment grade. Terkait indikator kerentanan fiskal yang mengacu pada batasan yang direkomendasikan IMF dan IDR, dapat dijelaskan bahwa batasan indikator tersebut didasarkan pada pertimbangan batasan indikator kerentanan dalam kondisi normal (sebelum adanya pandemi COVID-19).

Namun, pemerintah tetap memberikan perhatian dengan menyiapkan upaya antara lain optimalisasi sumber pembiayaan non utang (SAL dan SILPA), pinjaman lembaga multilateral & berbasis penanganan COVID-19 dengan bunga ringan, serta kerjasama dengan Bank Indonesia (BI) melalui SKB I sampai dengan SKB III. Ia pun mengaku siap jika diajak debat secara langsung dalam sebuah forum.

"Demikian tambahan penjelasan kami. Jika ada hal yang ingin dielaborasi, sangat dipersilakan. Harapan saya, mari gunakan data dan informasi terbaru agar lebih fair, objektif, dan kontekstual. Jika misalnya mau debat langsung di satu forum, kami pun S14P!" cuit Yustinus. (wid,twt,rls/dya)

KOMPOSISI UTANG INDONESIA PER 31 DESEMBER 2022

DEBET TO GDP **39,57%**

PINJAMAN NEGARA

Rp. 887,10

• Pinjaman Dalam Negeri
Rp 19,67

• Pinjaman Luar Negeri
Rp 867,43

- Bilateral : Rp 282,75
- Multilateral : Rp 529,99
- Commercial Bank : Rp 54,70
- Suppliers : -

KET

- Pinjaman
- Surat Berharga Negara

(Dalam Triliun Rupiah)

Sumber :
Berbagai Sumber
Diolah

11,47%

88,53%

POSISI UTANG RI PER
31 DES 2022 : **RP 7.733,99**

SURAT BERHARGA NEGARA

Rp. 6.846,89

• Domestik
Rp 5.452,36

- Surat Utang Negara : Rp 4.441,12
- Surat Berharga Syariah Negara : Rp 1.011,24

• Valas
Rp 1.394,53

- Surat Utang Negara : Rp 1.604,37
- Surat Berharga Syariah Negara : Rp 330,16

Giliran Perangkat Desa Geruduk DPR, 'Senggol' Evaluasi Menteri Desa



Suasana demo yang digelar Persatuan Perangkat Desa Indonesia di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Rabu (25/1/2023). (Foto:istimewa)

JAKARTA - Sekitar 100.000 perangkat desa berunjuk rasa di depan Gedung DPR pada Rabu (25/1/2023). Demo perangkat desa ini terjadi sepekan setelah puluhan ribu kepala desa (kades) se-Indonesia menggelar aksi serupa. Kala itu, para kades mendapat 'angin segar' terkait perpanjangan masa jabatan menjadi 9 tahun. Saat ini giliran perangkat desa yang salah satu tuntutan mereka mengevaluasi Menteri Desa karena dianggap tidak kompeten dalam menerjemahkan UU Desa.

"Menteri Desa kurang dalam kemampuan komunikasi terhadap stakeholder utama pembangunan desa yaitu kepala desa, BPD dan perangkat desa," kata Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI)

dalam tuntutan mereka. Menurut PPDI, Mendes hanya menganggap organ penting pembangunan desa adalah pendamping desa yang statusnya tak ada dalam UU Desa, tetapi mendapat perhatian besar. Padahal, kontribusi pendamping desa tidak signifikan dan tidak memiliki pengaruh langsung dalam pembangunan desa.

Selain itu tuntutan PPDI yaitu mendukung penuh usulan revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 dan menuntut agar revisi itu rampung sebelum Pemilu 2024. Kemudian, PPDI menuntut pengakuan jelas status perangkat desa, baik pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak (PPPK). Kendati demikian, PPDI tetap menghormati posisinya sebagaimana yang tertuang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014.

PPDI juga menuntut gaji perangkat desa bersumber dari APBN melalui alokasi dana desa yang tercantum khusus, bukan dari pertimbangan

kabupaten. Keempat, PPDI menuntut dana purnatugas setelah berhenti menjabat yang dihitung berdasarkan masa pengabdian.

Dalam tuntutan selanjutnya, PPDI menuntut meminta desa sebesar 15 persen dari APBN atau sekitar Rp 250 triliun per tahun untuk pembangunan desa. Pasalnya, dana desa jauh lebih bermanfaat bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan desa. Namun, dana desa justru jauh di bawah bansos yang mencapai Rp 380 triliun.

Diketahui, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Herman Khaeron dan Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha melakukan audiensi dengan para demonstran. Setelah keduanya menyapa para demonstran, dan menyampaikan komitmennya untuk mengakomodir tuntutan, massa aksi lantas membubarkan diri pada pukul 12.47 WIB.

Tanggapan Mendagri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menanggapi aksi demonstrasi yang digelar Persatuan Perangkat Desa Seluruh Indonesia (PPDI) di depan Gedung DPR. Tito mengaku sudah mengetahui tuntutan aksi tersebut karena dirinya sudah bertemu perwakilan PPDI kemarin, Selasa (24/1/2023). Dalam pertemuan itu, kata Tito, PPDI menyampaikan tiga hal. Pertama, mereka mengeluhkan soal banyaknya perangkat desa yang diberhentikan oleh kepala desa baru.

"Ketika kepala desanya baru, semua perangkat desa diganti," kata Tito kepada wartawan di sebuah hotel di Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Padaحال, kata Tito, pemecatan

perangkat desa tidak bisa dilakukan sesuka hati, melainkan harus sesuai ketentuan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Karena itu, Mendagri akan menyelesaikan persoalan ini dengan cara menegakkan ketentuan pemberhentian perangkat desa.

Persoalan kedua, PPDI meminta agar perangkat desa mendapatkan statusnya sama dengan Aparatur Sipil Negara (ASN). Terkait permintaan ini, Tito mengaku akan mengkajinya terlebih dahulu karena menyangkut revisi Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketiga, PPDI minta agar penghasilan tetap perangkat desa berasal dari dana perimbangan. Sebab, mereka kerap terlambat menerima penghasilan tetap dengan mekanisme sekarang, yakni bersumber dari alokasi Dana Desa.

Sementara terkait perpanjangan jabatan kades, Mendagri Tito masih akan mengkajinya.

Kemendagri masih akan memetakan terlebih dulu wacana ini, apakah lebih banyak membawa manfaat atau justru berdampak buruk. Soal perpanjangan masa jabatan dari enam kali tiga menjadi sembilan tahun. Saya berpendapat, kami kaji dulu. Kami kaji dulu positifnya apa, negatifnya apa," ujar Tito.

Tito menegaskan tidak akan menutup segala kemungkinannya. Ia pun berpendapat, tanpa diperpanjang pun, masa jabatan maksimal Kades saat ini sudah cukup lama. "Kalau banyak positifnya ya kenapa tidak, tapi kalau banyak mudaratnya ya mungkin tetap di posisi UU sekarang, 6 tahun kali 3, 18 tahun, kan lama juga itu," katanya.

Mantan Kapolri itu menyampaikan ia akan melibatkan tokoh-tokoh yang berkemampuan membahas persoalan ini. "Kami juga akan mengundang beberapa tokoh-tokoh yang paham mengenai masalah desa, pegiat desa, itu terdengar jelas suaranya," ungkap dia. (wid,rls,kum/dya)

ENAM TUNTUTAN PERANGKAT DESA YANG DISAMPAIKAN KE KOMISI II DPR

1. PPDI mohon kepada Ketua Komisi II dan anggota dewan untuk memasukkan perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa masuk ke dalam Prolegnas dan dapat dituntaskan pada tahun ini,
2. Persatuan Perangkat Desa Indonesia memohon kepada pemerintah melalui Ketua Komisi II, agar dapat memberikan kejelasan status perangkat desa Indonesia sebagai aparatur pemerintah desa dengan diterbitkannya UU Aparatur Pemerintah Desa yang mengatur kejelasan status perangkat sebagaimana UU tentang ASN.
3. PPDI mendesak terhadap pemerintah untuk menindak dengan tegas tindakan semena-mena terhadap pemberhentian perangkat desa nonprosedural, serta memberikan sanksi kepada kepala desa yang bertindak semena-mena melakukan pemecatan apalagi yang sudah sampai ke PTUN.
4. PPDI menolak dengan tegas gagasan, ide yang mengusulkan masa kerja perangkat desa sama dengan masa kerja kepala desa. PPDI bukan jabatan politik akan tetapi kami menjadi perangkat desa melalui seleksi akademik.
5. Mendorong pemerintah memfasilitasi peningkatan kapasitas perangkat desa, sebagai ajang peningkatan kemampuan dalam menunjang profesionalisme kerja.
6. Mendorong pemerintah memberikan honor/insentif terhadap ketua RT dan RW sebagai lembaga kemasyarakatan desa

Sejumlah Alat Peringatan Dini Bencana di Trenggalek Rusak

TRENGGALEK – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Trenggalek mendeteksi adanya kerusakan pada tujuh alat peringatan dini bencana (early warning system/EWS) rusak. Alat tersebut dipasang di sejumlah titik rawan tsunami dan tanah bergerak di daerah rusak dan tidak berfungsi.

"Satu alat EWS di Panggul milik BPBD Provinsi rusak. Selain itu ada tiga EWS lain milik BPBD yang dipasang di Kecamatan Munjungan sementara juga belum berfungsi dikarenakan link tower di Jedeg Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak roboh terkena angin kencang," kata Kepala BPBD Trenggalek, Stefanus Triadi Atmono dilansir dari antara jatim, Rabu (25/1/2023).

Enam EWS yang rusak tersebar di Desa Nglebeng sekitar Pantai Konang Kecamatan Panggul lalu di kawasan pesisir Kecamatan Munjungan, tepatnya di Desa Masaran, Masjid Jami dan Musala Ngadipuro di Desa Craken. EWS di kawasan pesisir ini berfungsi untuk memberi informasi dini potensi bencana tsunami.

Selain empat EWS tsunami yang rusak, satu EWS tanah longsor yang di pasang di Desa Dawuhan Kecamatan Trenggalek milik ESDM dan satu EWS tanah longsor di Desa Depok Kecamatan Panggul juga dilaporkan rusak.

Triadi mengatakan saat ini pihaknya bersama BPBD Provinsi Jawa Timur tengah mengupayakan perbaikan alat sistem pendeteksi dini bencana itu secara bertahap.

"EWS longsor di Desa Depok hari ini masih dalam tahap perbaikan. Nantinya bakal dilakukan secara bertahap, beserta perawatan rutin dan lain sebagainya," katanya.

Kendati ada yang rusak, Triadi memastikan beberapa EWS tsunami yang dipasang di sekitar Hotel Prigi, Balai Desa Karangandu dan mushala Panti Karangongso di Kecamatan Watulimo, serta satu EWS bencana tanah gerak di Desa Sumurup Kecamatan Bendungan masih berfungsi baik.

Demikian pula dengan satu EWS banjir di Kelurahan Kelutan di bantaran Sungai Ngasinan. Selain di Sungai Ngasinan, pemerintah juga memasang satu EWS milik ESDM Provinsi di Desa Jajar Kecamatan Gandusari.

"Untuk tiga EWS di Kecamatan Watulimo milik BMKG, EWS milik BPBD Provinsi di Sumurup dan EWS di Sungai Ngasinan milik BBWS (Brantas) dan lainnya kondisinya normal," kata Triadi.

Pemasangan EWS itu sebagai upaya mitigasi bencana, lantaran Kabupaten Trenggalek menjadi daerah berpotensi dilanda bencana alam.

Kondisi itu salah satunya dipengaruhi oleh tipologi wilayah



(Ilustrasi) Pemerintah telah menetapkan anggaran untuk pengadaan stok CPP dengan total Rp 26,89 triliun. (Foto: Antara)

yang mayoritas didominasi kawasan pegunungan dan berbatasan langsung dengan laut selatan Samudra Hindia.

Meskipun sejumlah alat pendeteksi dini bencana itu rusak dan tengah dalam proses perbaikan, Triadi mengimbau kepada masyarakat untuk tidak resah.

Selain melalui EWS, pihaknya juga melakukan upaya mitigasi lainnya melalui informasi perkembangan cuaca dan potensi-potensi bencana yang disampaikan secara berkala.

Sementara itu, sejumlah tempat di Kabupaten Trenggalek berpotensi terjadi bencana. Kabid Pencegahan, Kesiapsiagaan, dan Kedaruratan BPBD Trenggalek, Agung Widodo mengatakan kondisi cuaca ekstrem dapat menimbulkan berbagai potensi bencana. Mulai banjir, tanah longsor, angin kencang, hingga gelombang tinggi.

"Ini perlu menjadi kewaspadaan bersama, terutama untuk masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di daerah-daerah rawan bencana," kata Agung Widodo dilansir dari detik.com beberapa waktu lalu.

Dari data di BPBD Trenggalek, kawasan rawan bencana banjir tersebar di delapan kecamatan, antara lain Trenggalek, Karang, Pogalan, Gandusari, Kampak, Munjungan, Watulimo, dan Durenan. "Jadi potensi banjir tahun ini sudah terjadi di

delapan wilayah tersebut, sehingga saat kondisi cuaca ekstrem maka kita semua harus waspada," jelasnya.

Lanjut dia untuk kawasan rawan bencana tanah longsor hampir menyebar di seluruh wilayah Trenggalek. Beberapa titik paling rawan di Kecamatan Watulimo, Dongko, Pule, Panggul, Munjungan dan Bendungan.

"Terkait potensi bencana alam tersebut kami juga mengimbau kepada wisatawan yang hendak ke wilayah pesisir selatan untuk meningkatkan kewaspadaan, karena ada beberapa titik kerawanan bencana," ujarnya.

Menurutnya, seluruh wisata pantai yang ada di pesisir selatan masuk zona rawan bencana tsunami. Untuk itu pihaknya meminta wisatawan memperhatikan sistem peringatan dini yang terpasang serta jalur evakuasi.

Agung menambahkan di Kabupaten Trenggalek terdapat sejumlah destinasi wisata yang ramai dikunjungi wisatawan saat momen pergantian tahun. Berikut di antaranya Teluk Prigi yang berada di wilayah Kecamatan Watulimo. Ada sederet pantai yang berada di kawasan Teluk

Prigi. Antara lain Pantai Prigi, Pantai Simbaronce, Pantai Pasir Putih, Pantai Mutiara, Pantai Cengkong.

Pada momen akhir pekan atau hari libur, objek wisata tersebut dikunjungi ribuan orang dari berbagai daerah di Jawa Timur. Panorama alam yang indah serta destinasi yang saling berdekatan menjadi alasan warga untuk berkunjung ke pesisir Watulimo.

"Kalau di wilayah Watulimo ini pada saat cuaca ekstrem perlu diwaspadai adanya ancaman tanah longsor di ruas jalan nasional Durenan-Prigi," kata Agung. Pihaknya meminta pengguna jalan untuk meningkatkan kewaspadaan jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi.

Selain itu jalur tersebut juga memiliki potensi banjir yakni Desa Prigi dan Tasikmadu. Sedangkan kawasan pantai relatif aman dari ancaman banjir.

Kemudian, kawasan Konservasi Penyuluhan Taman Kili-kili di Kecamatan Panggul juga punya objek wisata lain yakni Pantai Pelang dan Pantai Konang. Secara umum tempat wisata tersebut relatif aman dari ancaman banjir dan tanah longsor.

Namun, yang perlu diwaspadai adalah akses menuju ke lokasi tersebut. Potensi banjir dan longsor justru terjadi pada akses utama Trenggalek-Panggul. Topografi pegunungan dan banyak terdapat tebing serta jurang menjadikan jalur utama Trenggalek-Panggul menjadi rawan.

"Sedangkan potensi banjir kalau di Panggul itu di wilayah kota kecamatan, tepatnya di Desa Wonocoyo atau jalur menuju Pacitan," imbuhnya. (lut/dya)



Satu alat EWS di Panggul milik BPBD Provinsi rusak. Selain itu ada tiga EWS lain milik BPBD yang dipasang di Kecamatan Munjungan sementara juga belum berfungsi dikarenakan link tower di Jedeg Desa Ngadimulyo Kecamatan Kampak roboh terkena angin kencang."

STEFANUS TRIADI ATMONO
Kepala BPBD Trenggalek

Kota dan Kabupaten Mojokerto Fokus Pengembangan Ekonomi



Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati (tengah) meluncurkan Tumbas Express, Rabu (25/1/2023)

MOJOKERTO - Pengembangan ekonomi di Mojokerto baik itu kabupaten maupun kota menjadi perhatian serius kedua daerah tersebut. Berbagai upaya pun dilakukan untuk bisa mendongkrak kembali perekonomian warga yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-19.

Sebagai upaya pengembangan ekonomi ini, Pemerintah Kabupaten Mojokerto Jawa Timur meluncurkan layanan kurir "Tumbas Exspress". Layanan ini untuk mendukung kelancaran transaksi pada marketplace "Tumbas" yang sudah ada saat ini guna meningkatkan perekonomian di kabupaten setempat.

Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati di Mojokerto, mengatakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto terus mengembangkan pelayanan marketplace lokal Tumbas. "Guna mendukung kelancaran transaksi pada marketplace Tumbas, kini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto resmi meluncurkan 'Tumbas Express'," katanya dilansir dari antarajatim.com, Rabu (25/1/2023).

Ia menyampaikan secara singkat teretusnya marketplace Tumbas ini untuk menjawab permasalahan para IKM di saat Pandemi COVID-19. "Permasalahan saat itu mengerucut pada pasar. Karena pasar dibatasi tidak boleh ada kerumunan," katanya.

Bupati Ikfina mengatakan saat itu pihaknya ingin membangun marketplace lokal untuk memfasilitasi para IKM yang terkendala dalam pemasaran produknya.

"Aplikasi ini adalah salah satu langkah kita untuk memfasilitasi IKM. Kita tidak perlu bingung-bingung mencari pasar, karena warga Kabupaten Mojokerto ini ada satu juta lebih, semua butuh produk dan semua bisa jadi pembeli. Kalau kita mau, kita bangun pasar sendiri," tuturnya.

Ia pun mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Mojokerto.

"Proses yang dilakukan memang butuh usaha, butuh berdarah-darah dulu, nanti kalau sudah jalan, pasti semuanya akan merasakan imbas baiknya. Makanya butuh komitmen dan niat baik. Kita ingin ekonomi di Kabupaten Mojokerto ini tumbuh dengan kekuatan sendiri," katanya.

Ia berharap, seluruh elemen di Kabupaten Mojokerto turut membesarkan city branding yang telah dimiliki Kabupaten Mojokerto, yakni "Kabupaten Mojokerto Full of Majapahit Greatness".

Dengan city branding ini, lanjut Ikfina, diharapkan mampu meningkatkan nilai jual produk-produk asli Kabupaten Mojokerto di pasaran.

"Kabupaten Mojokerto punya

banyak sentra, ada kerupuk tengiri, ada kerupuk rambak, cor kuning dan lain sebagainya, cuma brandingnya kurang kuat. Sehingga apa yang terjadi, kami tetap kirim barang, tapi ikut brand orang lain. Kalau sudah punya branding sendiri, dan membuat para pembeli datang ke sini, kami bisa jual produk sendiri harga lebih tinggi," ujarnya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto Iwan Abdillah mengatakan saat ini terdapat 12 kurir yang diturunkan dalam peluncuran perdan ini

"Kurir ini nanti yang akan mengirim barang dari penjual ke pembeli," kata dia.

Iwan menyebut dalam melaksanakan marketplace Tumbas, pihaknya tidak hanya melakukan pengembangan sistem aplikasinya, namun juga melakukan pengembangan dalam sistem operasionalnya.

Selain meluncurkan "Tumbas Express", Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto kali ini juga melangsungkan sosialisasi penggunaan "Tumbas Seller" versi mobile kepada para penjual.

"Dala m pelaksanaannya, banyak para seller yang perlu kami sosialisasikan cara pengoperasian versi mobile. Harapan kami para seller bisa semakin termudahkan," katanya.

Sementara itu, Wali Kota Mojokerto, Jawa Timur, Ika Puspitasari juga menyatakan bahwa ketahanan ekonomi masih menjadi prioritas pembangunan di Kota Mojokerto hingga tahun 2024.

"Ketahanan ekonomi ini bersumber pada rantai produksi pariwisata kemudian dikuatkan dengan ekonomi kreatif melalui beberapa fokus yaitu infrastruktur yang terintegrasi, dalam artian terhubung dari satu wilayah ke wilayah lainnya," katanya dalam Musrenbang di Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Rabu (25/1/2023).

Wali kota yang akrab disapa Ning Ita ini menjelaskan, ketahanan ekonomi juga bersumber pada transformasi digital, dalam hal ini masyarakat tidak hanya berpartisipasi dalam pemberdayaan secara konvensional, tetapi juga dalam pemahaman dan implementasi dalam berbagai bidang kehidupan terutama ekonomi yang mengarah pada digitalisasi.

"Dan hal ini sudah berjalan sejak 3 tahun yang lalu, sudah ada ribuan UMKM yang mendapatkan pelantikan tentang bagaimana berdagang melalui E-Marketplace," katanya.

Bukan hanya itu, kata dia, dalam pelantikan tersebut juga membahas bagaimana cara membuat toko daring, bagaimana mendaftarkan diri melalui E-Katalog LKPP agar UMKM bisa mengikuti pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah kota.

Dalam musrenbang tersebut juga dibahas tentang bagaimana cara menjaga stabilitas sosial politik yang merupakan tema kebijakan pada tahun 2024. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 merupakan tahun demokrasi, yang mana dalam satu tahun terdapat dua kali pemilu.

Sementara arah kebijakan tahun 2024, yakni menguatkan ketahanan dan pemerataan ekonomi masyarakat dengan pengembangan rantai produksi pariwisata dan ekonomi kreatif melalui infrastruktur terintegrasi, transformasi digital, dan stabilitas sosial politik, demikian Ika Puspitasari. (lut/dya)



Guna mendukung kelancaran transaksi pada marketplace Tumbas, kini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mojokerto resmi meluncurkan "Tumbas Express",

IKFINA FAHMAWATI
Bupati Mojokerto

A close-up portrait of Christine Hakim, an Indonesian actress. She is wearing glasses and a patterned scarf. The background is a soft, out-of-focus grey.

**CHRISTINE
HAKIM &**

**THE
LAST
OF US**

**TRENDING DI
TWITTER**

AKTRIS senior Christine Hakim mendadak jadi trending di Twitter pada Senin, 23 Januari 2023, siang WIB. Nama Christine Hakim ber-sanding dengan sebuah film yang sudah sangat ditunggu-tunggu oleh pecinta film, *The Last of Us*. Lalu, apa hubungannya Christine Hakim dan *The Last of Us*?

Seperti diketahui, Christine Hakim ikut dalam sebuah proyek film karya HBO. Dan pada hari ini, episode kedua *The Last of Us* karya HBO telah dirilis.

Episode kedua ini menjadi lanjutan dari episode pertama berjudul *When You're Lost in the Darkness* yang cukup laris manis di pasaran.

Dengan dirilisnya episode 2, nama Christine Hakim pun kembali disorot karena ikut membintangi serial televisi pasca-apokaliptik Amerika yang dibuat dan ditulis oleh Craig Mazin dan Neil Druckmann itu.

Dalam foto-foto yang beredar di media sosial, sosok Christine Hakim seolah berada di sebuah laboratorium penelitian.

Memang, sebelumnya muncul kabar jika aktor kenamaan tanah air tersebut memiliki peran sebagai ilmuwan dalam serial yang tayang perdana pada 15 Januari 2023 ini.

Christine Hakim memerankan tokoh bernama dr. Ratna yang bertugas untuk meneliti masalah penyakit otak yang menimpa umat manusia.

Sebuah foto yang kemudian trending di media sosial memperlihatkan bagaimana Christine Hakim mengambil jamur dari otak salah satu pasiennya.

Dalam film ini, jamur memang memiliki kunci penting dalam alur cerita. Pasalnya kehancuran peradaban modern dimulai karena infeksi jamur bernama *Cordyceps* yang memang ada di dunia nyata.

Selain adegan Christine Hakim dengan jamur, muncul pula foto ketika sang aktor senior berdialog dengan aktor senior lainnya, Yuyu Unru.

Profil Christine Hakim

Selama berkarir lebih dari 40 tahun dalam dunia sinema Indonesia, Christine Hakim tercatat sudah pernah meraih supremasi tertinggi dalam perfilman Indonesia yaitu 6 Piala Citra. Prestasi ini boleh dibilang belum disamai oleh aktris Indonesia lainnya hingga kini.

Christine Hakim tercatat juga sebagai orang Indonesia pertama yang pernah menjadi juri kehormatan *Sélection officielle "Feature Films"* dalam Festival Film Cannes 2002 bersama dengan sejumlah sineas lainnya seperti David Lynch, Sharon Stone, dan Michelle Yeoh.

Bernama lengkap Herlina Christine Natalia Hakim, perempuan kelahiran Kuala Tungkal (Jambi) 25 Desember 1956 ini sudah membintangi puluhan film yang sebagian di antaranya merupakan film-film berkualitas festival yang menang di berbagai kompetisi film bergengsi di luar negeri.

Mengawali debut main film dalam "Cinta Pertama" yang diproduksi tahun 1973, film ini langsung mengganjar Christine Hakim dengan sebuah penghargaan sebagai "Pemeran Utama Wanita Terbaik" di ajang Festival Film Indonesia 1974 yang diselenggarakan di Surabaya.

Sejak itu karir Christine Hakim makin naik dengan membintangi sejumlah film selama setahun. Penampilan gemilangnya dalam "Sesuatu yang Indah" kembali membuat Christine Hakim diganjar penghargaan Piala Citra pada ajang Festival Film Indonesia 1977 di Jakarta.

Prestasi ini semakin bertambah saat Christine Hakim dinobatkan sebagai "Pemeran Utama Wanita Terbaik" pada ajang Festival Film Indonesia 1979 di Palembang untuk permainannya yang menyentuh sebagai sosok Sri di film "Pengemis

dan Tukang Becak" (1978) yang naskahnya ditulis oleh Wim Umboh.

Tradisi memenangkan Piala Citra kembali ditorehkan oleh Christine Hakim sebagai "Pemeran Utama Wanita Terbaik" lewat film "Di Balik Kelambu" (1982) pada ajang penghargaan Festival Film Indonesia tahun 1983 yang diselenggarakan di Medan.

Daftar prestasi Christine Hakim makin memperkuat dirinya sebagai aktris terbaik saat gelar "Pemeran Utama Wanita Terbaik" juga jatuh ke tangannya untuk permainan acting yang mengesankan dalam "Kerikil-Kerikil Tajam" yang edar pada 1984 dimana film ini memberikannya Piala Citra untuk kelima kali.

Dalam film epik "Tjoet Nja' Dhien" yang rilis pada tahun 1988, Christine Hakim merebut gelar "Pemeran Utama Wanita Terbaik". Sosoknya sebagai pahlawan wanita asal Aceh yang menentang kolonialisme dinilai banyak kalangan hampir mendekati tokoh aslinya.

Saat perfilman Indonesia sedang mati suri di era 90-an, tercatat Christine Hakim hanya bermain dalam empat film, yaitu "Sinyo Salam" (1993), "Nemuru Otoko" (1996), "Gordel Van Smaragd, De" (1997) serta "Daun di

Atas Bantal" (1998) yang merupakan garapan sutradara Garin Nugroho. Kecuali "Daun di Atas Bantal", ketiga film yang dimainkan Christine Hakim tidak sempat ditayangkan oleh bioskop lokal karena digarap oleh sineas luar negeri dan distribusinya dipegang rumah produksi bukan dari Indonesia. Sekedar catatan, "Daun Di Atas Bantal" sendiri pernah ditayangkan di ajang bergengsi Festival Film Cannes.

Di masa krisis mutu perfilman nasional pada era 90-an, Christine Hakim pun banting setir menjadi pemain sinetron. Sejumlah sinetron yang sempat dibintanginya memang bukan sinetron murahan, tercatat dia bermain di tiga judul sinetron yaitu; "Bukan Perempuan Biasa" arahan Jajang C. Noer, "Tiga Orang Perempuan", serta "Anakku Terlahir Kembali".

Ketika perfilman Indonesia mencoba bangkit kembali di era 2000-an awal, Christine Hakim langsung mengambil peran penting dalam film penuh pujian "Pasir Berbisik". Dengan lawan main Dian Sastrowardoyo, aktris muda yang sedang naik daun ketika itu, film ini bertabur berbagai penghargaan di ajang festival film luar dan dalam negeri. (berbagai sumber)



RETINOPATI DIABETIK, PENYEBAB KEBUTAAN TERBANYAK KETIGA DI DUNIA

RISET Kesehatan Dasar (Rikesdas) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengestimasi pada tahun 2030, jumlah penderita diabetes melitus (DM) di Indonesia akan mencapai 21,3 juta penduduk.

Hal ini akan menjadikan Indonesia menempati peringkat keempat dengan populasi DM terbesar di dunia.

Menurut dr. Sausan Rasyid, mengutip riset, retinopati diabetik merupakan komplikasi penyakit DM pada mata yang paling sering terjadi.

Diperkirakan 1 dari 3 penderita DM mengalami retinopati diabetik. Retinopati diabetik juga menjadi penyebab kebutaan ketiga di dunia.

"Semakin lama seseorang menderita diabetes dan gula darah

yang tidak terkontrol, semakin besar kemungkinannya mengalami komplikasi mata ini," jelasnya dalam keterangan tertulis, Senin (23/1/2023).

Kadar gula darah yang tidak terkontrol menyebabkan kerusakan pembuluh darah kecil pada lapisan tipis peka cahaya di bagian belakang mata (retina), dimana pembuluh darah ini seharusnya memberi nutrisi dan oksigen ke retina.

Sebagai kompensasi mata berusaha menumbuhkan pembuluh darah baru. Namun, pembuluh darah baru tersebut tidak berkembang secara sehingga mudah bocor.

Hal ini dapat berujung pada perdarahan di retina, robekan retina, dan peningkatan tekanan bola mata.

Menurut Sausan, masalah utama dalam penanganan retinopati diabetik adalah keterlambatan diagnosis karena sebagian besar penderita pada tahap awal tidak merasakan gangguan penglihatan.

Beberapa gejala yang perlu diwaspadai meliputi penglihatan yang menurun secara bertahap, bercak hitam/ bercak melayang pada penglihatan, penglihatan mendadak terhalang, dan nyeri pada mata.

Gangguan penglihatan mengakibatkan seseorang kehilangan kemandirian, kesempatan untuk bekerja, dan penurunan produktivitas yang dapat berujung pada kemiskinan.

Kebutaan bukan hanya akan menjadi beban bagi seorang individu dan keluarganya, melainkan juga untuk negara. Oleh karenanya tindak pencegahan gangguan penglihatan dan kebutaan pada penderita DM sangat diperlukan.

Diabetes dan kematian

Sausan menyampaikan, mengontrol kadar gula darah serta penyakit penyerta lain seperti tekanan darah dan kadar kolesterol sangatlah penting.

Penderita diabetes harus melakukan pemeriksaan skrining mata sesegera mungkin saat terdiagnosis dan dianjurkan melakukan pemeriksaan mata berkala satu tahun sekali meskipun tidak ada keluhan pada mata.

Saat ini, di Indonesia masih terdapat banyak kendala dalam menjalankan skrining retinopati diabetik, baik karena keterbatasan dalam kapasitas sumber daya manusia maupun fasilitas.

Tindakan yang akan dilakukan dokteruser mata pada pasien retinopati diabetik bergantung pada

derajat keparahannya.

Beberapa yang mungkin dilakukan seperti suntikan obat ke dalam mata, tindakan laser, ataupun operasi.

Manusia di Indonesia wajib waspada dan mengenalo gejala awal dari penyakit yang paling mematikan dan tidak menular.

Kemenkes memaparkan bahwa diabetes mellitus (DM) merupakan penyakit kronis atau menahun yang berupa gangguan metabolik, umumnya ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah yang diatas.

Berdasarkan data Rikesdas tahun 2018, prevalensi diabetes melitus naik dari 6,9 persen menjadi 8,5 persen per tahun 2018. Kondisi ini menurunkan angka harapan hidup selama 5 hingga 10 tahun (Bisnis) kandungan garamnya sangat berlebihan. Kenapa garam itu berbahaya bagi penderita hipertensi? Karena garam mengandung Natrium dan Natrium ini memiliki sifat-sifat jahat untuk tubuh.

"Dengan mengonsumsi garam secara menerus maka natrium akan masuk sel, pada saat masuk sel maka cairan juga akan masuk kedalam semua sehingga bisa overload (kelebihan) cairan dan kelebihan cairan ini membuat jantung memompa lebih kuat sehingga menaikkan tensi," paparnya. (Bisnis)



Sepeda Listrik Tenaga Surya Buatan Mahasiswa UMM

PENGUNAAN sumber energi ramah lingkungan terus didorong di tengah pemanasan global. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tak mau ketinggalan dengan menciptakan sepeda listrik tenaga surya.

Tim mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) yakni Brilly Eldon Fachrudin dan sembilan anggota timnya membuat sepeda listrik tenaga surya.

Produk karya Brilly mampu menyempurnakan konsep yang diangkat oleh seniornya dan dinilai memuaskan.

"Jika angkatan sebelumnya belum berhasil menstabilkan daya yang masuk, Alhamdulillah tim kami berhasil menemukan dan memecahkan permasalahan tersebut," ujarnya dikutip dari laman resmi UMM.

Brilly menjelaskan cara kerja sepeda tenaga surya tersebut. Energi dari cahaya matahari yang masuk ke panel akan langsung ke aki, kemudian ke mesin selanjutnya yaitu controller yang menghubungkan antara dinamo dengan setelan gas.

"Dari cahaya matahari disambungkan ke controller untuk



Tim pembuat sepeda listrik tenaga surya mahasiswa UMM. (DOK website muhammadiyah.or.id)

menstabilkan arus daya masuknya ke aki, sedangkan dari aki nanti masuk ke mesin lagi di controller. Ini untuk menghubungkan antara dinamo dan setelan gasnya agar arus yang dikeluarkan oleh akinya nanti stabil," urai Brilly.

Mereka pun lalu melakukan uji coba pada saat malam hari, di mana tidak ada cahaya matahari atau arus yang masuk.

Mereka menggunakan cahaya matahari yang telah terlebih dulu disimpan pada siang hari sebelumnya sampai penuh.

Uji coba ini pun berhasil dilakukan dengan perjalanan sekitar 12km, yaitu dari Sawojajar ke Kampus III UMM di Jalan Raya Tlogo Mas.

Perjalanan ini menghabiskan 3 bar daya dari total 5 bar keseluruhan yang

tersedia.

Listrik yang dihasilkan dari cahaya matahari tidak hanya menghasilkan arus untuk berjalannya sepeda, melainkan juga dapat menyalakan lampu pada sepeda.

Selain itu Brilly dan tim juga mengubah peletakan pedal yang awalnya diletakan pada roda belakang, diganti ke depan agar berkerja dengan semestinya. Juga agar mesin tidak mudah rusak.

"Manfaatnya adalah untuk mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, penghematan listrik, dan pemanfaatan energi matahari. Penggunaan jangka panjang juga lebih efisien, terutama penggunaan jarak tempuh dekat," tegas Brilly.

Dia pun berharap, jika inovasinya dapat menjadi salah satu ikhtiar manusia menjaga bumi dari polusi udara penyebab kendaraan bermotor.

Ke depan, Brilly dan timnya ingin

inovasi ini dapat digunakan secara universal. Mereka berencana mengembangkan produk agar mesin yang digunakan tersebut dapat diaplikasikan di berbagai sepeda lain.

Rahmat Wisnu Wardana, Kepala Laboratorium Teknik Industri UMM menyampaikan, ide sepeda listrik yang diangkat kelompok Brilly menarik perhatian dibanding produk lain di Product Development Exhibition 2023. Bukti nyata dari hasil terobosan sepuluh anak muda ini menjadi hal pertama yang mencuri kagumnya.

"Mereka bahkan sudah melakukan uji coba dari Sawojajar ke UMM kampus III tanpa mengayuh sama sekali. Itu satu hal yang keren. Apalagi pada umumnya sepeda listrik beroperasi dengan menggunakan pengelasan yang dilakukan langsung dengan menghubungkan pada daya, sedangkan karya ini menggunakan tenaga surya," katanya (umm.ac.id)



Sepeda listrik tenaga surya buatan mahasiswa UMM. (DOK website muhammadiyah.or.id)



PRODUK TEMBAKAU ALTERNATIF, TEKAN PREVALENSI PEROKOK

KETUA Masyarakat Sadar Risiko Indonesia (MASINDO), Dimas Syailendra R mengatakan Indonesia dapat memanfaatkan produk tembakau alternatif untuk menekan prevalensi perokok.

Produk tembakau alternatif, seperti produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektrik atau vape, dan kantong nikotin, terbukti berhasil menurunkan angka perokok di sejumlah negara maju.

Ia mengharapkan pemerintah dapat memaksimalkan produk tembakau alternatif, seperti produk tembakau yang dipanaskan, rokok elektrik atau vape, dan kantong nikotin, mengingat angka perokok di Indonesia menembus lebih dari 65 juta orang.

Tingginya angka perokok tersebut dapat berdampak terhadap kualitas kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah memerlukan pendekatan yang berbeda dengan memanfaatkan penggunaan produk tembakau alternatif.

Menurut Dimas, pemanfaatan

produk tembakau alternatif sebagai alat bantu untuk mengatasi permasalahan rokok sudah diberdayakan oleh Inggris, Jepang, dan Swedia. Berkat ragam produk tersebut, angka perokok di ketiga negara tersebut disebut mengalami penurunan.

Berkat pemanfaatan produk tembakau alternatif, jumlah perokok di Inggris pada tahun 2021 mencapai 13,3 persen atau setara 6,6 juta jiwa. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2020 yang mencapai 14 persen.

Sementara di Jepang, prevalensi merokok pada tahun 2020 mencapai sekitar 20,10 persen, mengalami penurunan 0,40 persen dari tahun 2019.

Selain itu, pada 2022, prevalensi merokok di Swedia menurun menjadi sekitar 5,6 persen dari total populasi. Hal ini membuat Swedia menjadi negara dengan tingkat prevalensi merokok paling rendah di Uni Eropa, bahkan salah satu yang terendah di dunia.

"Kehadiran produk tembakau alternatif dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat," kata Dimas.

Sebagai langkah awal dalam pemanfaatan produk tembakau alternatif, pemerintah dan para pemangku kepentingan terkait, seperti kementerian/lembaga, perguruan tinggi, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas perlu memberikan edukasi bagi masyarakat, khususnya perokok dewasa, mengenai informasi yang akurat tentang produk tersebut.

Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perbedaan dan profil risiko produk tembakau alternatif dengan rokok.

Berdasarkan hasil sejumlah kajian ilmiah di dalam dan luar negeri, produk tembakau alternatif memiliki risiko yang lebih rendah daripada rokok karena tidak melalui proses pembakaran.

Oleh karena itu, produk tembakau alternatif tidak menghasilkan asap yang mengandung TAR yang dapat memicu berbagai penyakit berbahaya bagi penggunaannya.

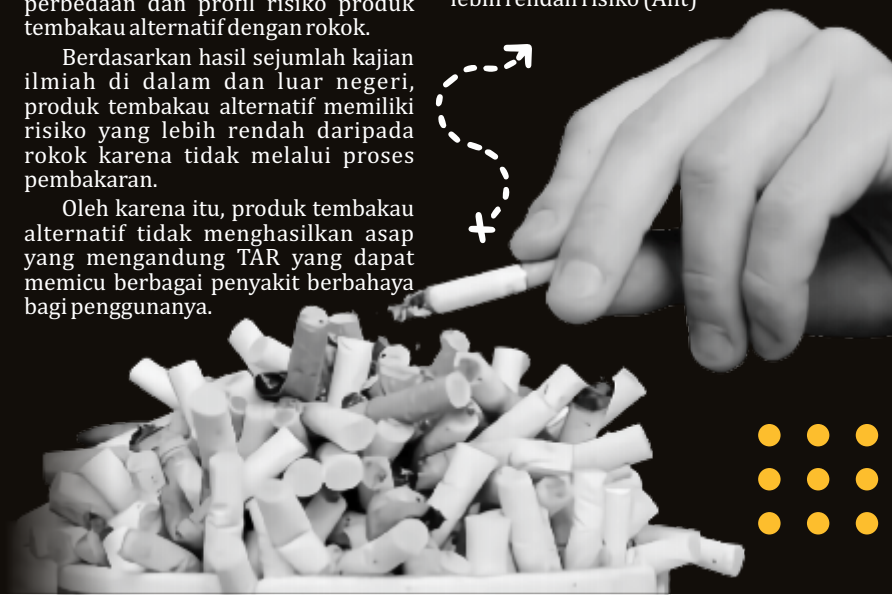
Masih banyak misinformasi yang beredar di masyarakat yang menyebutkan bahwa produk tembakau alternatif memiliki risiko yang lebih tinggi daripada rokok. Hal ini salah. Faktanya, karena tidak melalui proses pembakaran, produk tembakau alternatif tidak menghasilkan asap dan memiliki risiko yang jauh lebih rendah daripada rokok.

Kesuksesan ketiga negara tersebut membuktikan bahwa produk tembakau alternatif dapat menjadi pilihan bagi perokok dewasa untuk beralih ke produk tembakau yang lebih rendah risiko (Ant)

“Kehadiran produk tembakau alternatif dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat

DIMAS SYAILENDRA R

Ketua Masyarakat Sadar Risiko Indonesia (MASINDO)



Menerka Arah Aliran ... (dari hal 1)

KETUA DPRD Jawa Timur (Jatim), Kusnadi turut diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi dana hibah untuk kelompok masyarakat. Pemeriksaan dilakukan di Kantor BPKP Jatim. Pantauan kumparan, Kusnadi diperiksa sejak pukul 12.10 WIB dan baru selesai sekitar pukul 18.54 WIB. Setelah diperiksa hampir 6 jam, Kusnadi langsung meninggalkan lokasi tanpa menjelaskan materi pemeriksaan. "Tanya apalah ini kan [ranah] KPK, biar KPK yang menjawab kan gitu," ujar Kusnadi di kantor BPKP, Rabu (25/1/2023).

Kusnadi juga tidak menjabarkan pertanyaan yang diberikan oleh penyidik KPK dan ada berapa pertanyaan yang diajukan. "Menyangkut semua lah. Saya enggak hitungya," ucapnya.

Bahkan, Kusnadi tampak kebingungan dan sesekali melempar senyum saat sejumlah awak media menanyakan tentang penggeledahan KPK di rumah istrinya di Desa Puter, Kecamatan Kembangbahu Lamongan. Sambal menggaruk-garuk kepala dan menyisir rambutnya, Kusnadi menjawab tidak tahu. "Saya tidak tahu," ucapnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Jatim Anwar Sadad mengaku menjelaskan alur dana hibah kepada tim penyidik KPK. Mulai dari bagaimana anggota dewan menerima aspirasi masyarakat, hingga memperjuangkan aspirasi itu melalui peraturan perundangan yang berlaku. Setiap aspirasi yang diterima legislator menurut dia akan disampaikan dalam rapat paripurna. Dokumen aspirasi itu dibahas bersama komisi, mitra dan pimpinan DPRD. Lalu diserahkan kepada eksekutif untuk dijadikan sebagai bahan masukan dalam rangka musyawarah perancangan pembangunan (Musrembang). Kemudian perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Semua sampai pemeriksaan APBD, sampai evaluasi oleh Kemendagri juga kita jalankan evaluasi Kemendagri sampai, kemudian lahir peraturan kepala daerah Pergub sampai dengan penjabaran APBD. Itu semua prosuder itu kita sampaikan apa adanya. Kita sampaikan semuanya," jelas Sadad.

Ketua DPD Partai Gerindra Jatim berharap penjelasannya memberi titik terang dalam proses hukum yang sedang ditangani KPK. "Mudah-mudahan ini menjelaskan. Apa yang selama ini meresahkan masyarakat Jawa Timur," ujarnya.

Terpisah, Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri membenarkan, Kusnadi menjalani pemeriksaan di Jawa Timur. "Pemeriksaan dilakukan di Kantor BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Jawa Timur," kata Ali dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Rabu (25/1/2023).

Selain Kusnadi, penyidik juga memanggil tiga Wakil Ketua DPRD Jatim. Mereka adalah Anik Maslachah,

Achmad Iskandar, dan Anwar Sadad. Sekretaris DPRD Jatim Andik Fadjar Tjahjono juga dipanggil penyidik. Selain jajaran anggota dewan, KPK juga memanggil sejumlah pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemprov Jatim. Mereka adalah Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) dan Bina Marga Jatim Edy Tambeng Widjaja; Kadis Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Baju Trihaksoro; dan kadis PU Sumber Daya Air Muhammad Isa Anshori.

Saksi-saksi lain yang juga dipanggil adalah PNS pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sampang bernama Rudi; Kepala Desa Robatal bernama Hodari. Kemudian, tiga Staf Bidang Rendalev Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim bernama Angga Ariqint N, Arief Rachman Hakim, Moh. Huda Prabawa, dan Nining Lustari.

Atasan mereka, Kepala Bidang (Kabid) Randalev, Ikmal Putra juga dipanggil. Selanjutnya, KPK juga memanggil Moh. Holil Affandi dari pihak swasta. Dengan demikian, jumlah keseluruhan saksi yang dipanggil hari ini sebanyak 16 orang.

Sampai berita diturunkan, KPK belum membeberkan materi pemeriksaan maupun hadir atau tidaknya para saksi tersebut. Sebagai informasi, dalam perkara ini KPK telah menggeledah sejumlah lokasi di Jawa Timur. Penyidik menggeledah kantor pimpinan DPRD Jatim dan semua fraksi di gedung wakil rakyat itu.

Selang beberapa waktu kemudian, KPK juga menggeledah kantor Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan wakilnya, Emil Elestianto Dardak. Kemudian, kantor Sekretariat Daerah Jatim juga digeledah. KPK juga menggeledah sejumlah rumah pimpinan DPRD Jatim seperti, kediaman Ketua Komisi D DPRD Jatim dan Koordinator Perencanaan dan Pendanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jatim.

Setelah Geledah Gedung DPRD Jatim Kedua lokasi itu digeledah penyidik pada Kamis (19/1/2023). Kemudian, pada Selasa (17/1/2023) dan Rabu (18/1/2023) penyidik juga menggeledah empat lokasi lain. Tempat tersebut adalah rumah kediaman Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim yang beralamat di Pucang Sewu, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim yang beralamat di Sukodono, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Kemudian, kediaman anggota DPRD Provinsi Jatim yang beralamat di Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur serta rumah Kepala Bappeda Jatim, Mohammad Yasin. KPK menyatakan akan menganalisis sejumlah barang bukti yang ditemukan untuk kemudian dilakukan penyitaan. "Analisis dan penyitaan akan segera dilakukan untuk melengkapi berkas perkara penyidikan tersangka Sahat Tua P. Simandjuntak," tutur Ali.

Dalam kasus ini, KPK menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Sahat Tua Simandjuntak sebagai tersangka.

Ia diduga menerima suap terkait dana hibah untuk kelompok masyarakat.

Kasus ini terkait dana hibah yang bersumber dari APBD Pemprov Jatim. Dalam tahun anggaran 2020 dan 2021, APBD Pemprov Jatim merealisasikan dana belanja hibah dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp 7,8 triliun kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat yang ada di Jawa Timur.

Praktik suap diduga sudah terjadi untuk dana hibah tahun anggaran 2020 dan 2021. Sahat yang merupakan politikus Golkar dan Abdul Hamid diduga kemudian bersepakat untuk praktik tahun anggaran 2022 dan 2023. "Diduga dari pengurusan alokasi dana hibah untuk Pokmas, Tersangka STPS (Sahat Tua Simandjuntak) telah menerima uang sekitar Rp 5 miliar," ungkap Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.

Aktivis anti korupsi yang sekaligus Ketua Bidang Pengaduan Masyarakat Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi (GNPK) Jatim Miko Saleh menilai tindakan KPK menggeledah para politisi di eksekutif maupun DPRD Jawa Timur sangat tepat dan pantas diapresiasi.

Diantaranya penggeledahan KPK ke ruangan Ketua Partai Demokrat Jatim yang juga Wagub Jatim Emil Dardak, rumah Bendahara Demokrat yang juga ketua Komisi D DPRD Jatim Agung Mulyono, dan rumah Wakil Ketua DPRD Jatim dari Fraksi Demokrat Achmad Iskandar.

"Itu adalah langkah yang paling positif bagi KPK. Kami (GNPK Jatim) apresiasi langkah KPK dalam OTT di Jatim. Khususnya dana hibah DPRD Jatim," terang Miko Saleh, Selasa (24/1/2023).

Miko mengharapkan agar KPK tidak hanya berhenti sampai OTT saja, masih banyak pekerjaan rumah (PR) pasca OTT, yakni menelusuri dana hibah tersebut mengalir kemana saja. Bila perlu dibentuk tim khusus untuk melakukan penelusuran sampai ke bawah. "Kita berharap KPK jangan hanya berhenti di OTT saja. Harus ditelusuri aliran dana hibah tersebut. Kemana saja dan pada siapa. Bila perlu by name, by address," ujarnya.

Untuk diketahui, penyidik KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dalam pengelolaan dana hibah Pemprov Jatim, yakni Sahat Tua P. Simandjuntak (STPS) Wakil Ketua DPRD Provinsi Jatim dan Rusdi (RS) selaku staf ahli STPS.

Sementara itu, dua orang tersangka selaku pemberi suap ialah Abdul Hamid (AH) Kepala Desa Jelgung, Kecamatan Robatal, Kabupaten Sampang, sekaligus selaku koordinator kelompok masyarakat (pokmas), serta Ilham Wahyudi (IW) alias Engg koordinator lapangan pokmas.

Penetapan empat tersangka itu didahului dengan adanya pengaduan dari masyarakat. Berikutnya, KPK mengumpulkan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

KPK kemudian melakukan penyelidikan dalam upaya menemukan adanya peristiwa pidana,

sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan status kasus itu ke tahap penyidikan. Penyidik KPK kemudian menangkap empat orang tersebut dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jatim pada Rabu malam, 14 Desember 2022.

Untuk kebutuhan proses penyidikan, tim penyidik menahan para tersangka untuk 20 hari ke depan terhitung mulai 15 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023. Penyidik kemudian memperpanjang masa penahanan tersangka STPS dan kawan-kawan untuk masing-masing selama 40 hari ke depan mulai 4 Januari hingga 12 Februari.

Tersangka STPS ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur, sementara RS dan AH ditahan di Rutan KPK pada Kaveling C1 Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, serta IW ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK.

Sebagai penerima, STPS dan RS disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau b jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (wid,rls,kum,dtc/dya)

KRONOLOGI PENANGKAPAN SAHAT

- **Diawali pengaduan dari masyarakat**
KPK mengumpulkan berbagai informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut. KPK kemudian melakukan penyelidikan dalam upaya menemukan adanya peristiwa pidana sehingga ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup dan meningkatkan status kasus itu ke tahap penyidikan.
- **SITA UANG RP 1 MILIAR**
KPK menyita uang tunai dalam bentuk pecahan mata uang rupiah dan mata uang asing berupa dolar Singapura dan dolar AS dengan jumlah sekitar Rp1 miliar. OTT dilakukan sekitar pukul 20.30 WIB di salah satu mall di Surabaya.
- **TERIMA UANG RP 5 MILIAR**
KPK menduga tersangka Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Sahat Tua P. Simandjuntak telah menerima uang sekitar Rp5 miliar dari pengurusan alokasi dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas). Untuk tahun anggaran 2020 dan 2021 dalam APBD Pemerintah Provinsi Jatim merealisasikan dana belanja hibah dengan jumlah seluruhnya sekitar Rp7,8 triliun kepada badan, lembaga, organisasi masyarakat yang ada di Pemprov Jatim. Distribusi penyalurannya, kata dia
- **FEE IJON DANA HIBAH S**
Besaran nilai dana hibah yang diterima pokmas di mana penyalurannya difasilitasi oleh tersangka STPS dan juga dikoordinir oleh tersangka AH selaku koordinator pokmas yaitu, pada 2021 telah disalurkan sebesar Rp 40 miliar dan pada 2022 telah disalurkan sebesar Rp40 miliar
- **PENAHANAN**
Tersangka STPS ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur sejak 15 Desember 2022. Sedangkan untuk tersangka RS dan AH ditahan di Rutan KPK pada Kaveling C1 Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK. Untuk tersangka IW ditahan di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih KPK. Sebagai penerima, STPS dan RS disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau b jo Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sementara, AH dan IW sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kompak dengan Suaminya, Putri Minta Dibebaskan dan Garis Polisi Dicotot



**PUTRI
CANDRAWATHI**

**RICHARD
ELIEZER**

JAKARTA - Kompak dengan suaminya yaitu Ferdy Sambo, Putri Candrawathi juga meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) membebaskan dari tuntutan 8 tahun penjara terkait kasus pembunuhan berencana Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat. Tim penasihat hukum mewakili Putri, mereka meminta hakim menyatakan klien mereka tak bersalah.

"Menyatakan terdakwa Putri Candrawathi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, atau tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dan dakwaan subsidair Pasal 338 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," kata penasihat hukum Putri, Arman Hanis, di PN Jaksel, Rabu (25/1/2023).

Sebelumnya terdakwa lain yaitu Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal juga meminta pembebasan dan pengembalian nama baik saat sidang pleidoi sebelumnya. Arman meminta hakim membebaskan istri Ferdy Sambo dari segala tuntutan hukum. Arman juga meminta kliennya dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer dan subsidier jaksa.

"Membebaskan terdakwa Putri Candrawathi dari segala dakwaan (verkapte vrijspraak), atau setidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan (onslag van alle rechts vervolging). Memerintahkan penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa Putri Candrawathi dari Rumah Tahanan Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cabang Salemba," ujar Arman.

Arman lalu meminta kepada majelis hakim untuk memulihkan nama baik istri mantan Kadiv Propam Polri tersebut. "Memulihkan nama baik dan hak Terdakwa Putri Candrawathi dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya

seperti semula," imbuhnya.

Selain itu, dalam kesimpulan pembelaannya, Arman Hanis dkk meminta hakim memerintahkan Kapolri mencabut garis polisi di rumah Duren Tiga. Tim pengacara meminta hakim untuk memerintahkan barang bukti milik Putri dikembalikan.

"Memerintahkan penuntut umum untuk pencabutan garis polisi (police line) rumah terdakwa yang terletak di Jalan Duren Tiga No. 46, Jakarta Selatan. Memerintahkan penuntut umum agar mengembalikan barang barang milik terdakwa dan keluarga terdakwa," ujarnya.

Arman memohon majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terhadap Putri Candrawathi. Arman menyebut Putri merupakan ibu dari 4 anak yang membutuhkan asuhan dan kasih sayang ibu.

"Terdakwa merupakan ibu dari 4 anak, 3 di antaranya belum dewasa, bahkan putra bungsu masih di bawah 3 tahun (batita) tentunya membutuhkan asuhan, kasih dari orang tua terutama ibunya," ujarnya.

"Terdakwa juga berperan penting dalam memajukan Bhayangkari Kepolisian Republik Indonesia yang secara tidak langsung mendukung Kepolisian Republik Indonesia dalam bidang kegiatan sosial," imbuhnya.

Eliezer: Saya Diperalat, Dibohongi, Disia-siakan

Sementara itu, Richard Eliezer merasa diperalat sehingga membuatnya terseret kasus hukum. Saat ini, ia adalah terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Hal itu disampaikan Eliezer dalam pleidoi pribadi atau nota pembelaannya yang dibacakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (25/1/2023).

Eliezer tidak menyebut spesifik siapa yang memperalatnya. Namun, keluh kesah itu disampaikan saat ia

bercerita masa-masa awal dia menjadi ajudan Ferdy Sambo. Itu terjadi pada 30 November 2021, di mana ia dipanggil ke Mako Brimob dan terpilih menjadi driver Ferdy Sambo yang saat itu menjabat menjadi Kadiv Propam.

"Di masa awal-awal pengabdian saya atas kecintaan saya terhadap Negara, dan kesetiaan kepada Polri khususnya Korps Brimob, saya dipilih menjadi ajudan yang di mana tugas saya menjaga dan mengawal atasan," kata Eliezer saat membacakan pleidoinya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Namun Eliezer mengaku bekerja sebagai ajudan hanya diperalat dan disia-siakan. Ia merasa kejujuran yang diberikannya tidak dihargai, malah dimusuhi. "Di usia saya ini, tidak pernah terpikirkan ternyata oleh atasan di mana saya bekerja memberikan pengabdian, kepada seorang Jenderal berpangkat bintang dua yang sangat saya percaya dan hormati, di mana saya yang hanya seorang prajurit rendah berpangkat Bharada yang harus mematuhi perkataan dan perintahnya, ternyata saya diperalat, dibohongi dan disia-siakan, bahkan kejujuran yang saya sampaikan tidak dihargai malahan saya dimusuhi," kata Eliezer.

"Begitu hancurnya perasaan saya dan goyahnya mental saya, sangat tidak menyangka akan mengalami peristiwa menyakitkan seperti ini dalam hidup saya namun saya berusaha tegar," lanjut dia.

Eliezer bercerita, setelah menjalani pendidikan, penugasan pertama dia adalah menjadi Satgas operasi Timombala Poso selama 7 bulan dari Maret sampai Oktober 2020 sebagai navigasi darat. Penugasan berikutnya di Manokwari-Papua Barat menjadi tim pengamanan Pilkada pada Desember 2020, kemudian penugasan SAR evakuasi Sriwijaya air SJ-182 pada Januari 2021. (wid,rls,dtc/dya)

URUTAN SIDANG PIDANA YANG DIRANGKUM DARI KUHAP

1. Dakwaan. Jaksa akan mendakwa dugaan kesalahan terdakwa.
2. Eksepsi. Jawaban terdakwa atas dakwaan jaksa.
3. Tanggapan jaksa atas eksepsi.
4. Putusan Sela. Hakim akan membacakan apakah eksepsi diterima atau tidak. Bila diterima, maka proses sidang selesai sesuai amar putusan sela. Bila eksepsi ditolak, maka sidang dilanjutkan.
5. Pemeriksaan Saksi. Dimulai dari saksi fakta, saksi ahli dan saksi yang meringankan.
6. Pemeriksaan saksi terdakwa/pengakuan terdakwa.
7. Tuntutan. Setelah menjalani proses pembuktian, jaksa akan mengajukan tuntutan terhadap terdakwa, berapa lama hukuman yang harus dijalani oleh terdakwa.
8. Pembelaan (Pleidoi). Dalam hal ini terdakwa akan membela diri terkait tuntutan jaksa.
9. Replik. Jaksa akan membuat tanggapan atas pleidoi terdakwa.
10. Duplik. Dalam hal ini terdakwa diberikan kesempatan terakhir mengajukan bantahan atas replik jaksa.
11. Putusan atau vonis. Majelis hakim akan membacakan putusan. Ada tiga jenis putusan: bebas, lepas dan terbukti melakukan pidana disertai jenis pidana. Bila kedua belah pihak, jaksa dan terdakwa, menerima putusan, maka statusnya menjadi berkekuatan hukum tetap dan terdakwa bisa langsung dieksekusi.

TUNTUTAN BAGI PARA TERDAKWA PEMBUNYAN BRIGADIR J

- Ferdy Sambo Dituntut Seumur Hidup**
Tuntutan penjara itu berdasarkan dakwaan premier Pasal 340 subsidier Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
- Putri Candrawathi Dituntut 8 Tahun Penjara**
Jaksa menerangkan, Putri Candrawathi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan
- Kuat Maruf Dituntut 8 Tahun Penjara**
Tuntutan dengan hukuman delapan tahun penjara diberikan JPU berdasarkan dakwaan premier pasal 340 subsidier Pasal 338 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Hukuman itu lebih ringan dibandingkan dengan hukuman maksimal yang mencapai pidana mati.
- Bripka Ricky Rizal Dituntut 8 Tahun Penjara**
Tuntutan 8 tahun penjara Bripka RR sama dengan tuntutan JPU terhadap Kuat Maruf.
- Bharada Richard E Dituntut 12 Tahun Penjara**
Jaksa menilai Bharada E telah bersalah melakukan pembunuhan terhadap Brigadir J.